

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Teknologi informasi kini menjadi bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi atau lembaga pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara guna memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya [12]. Penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan diwujudkan dalam bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu lembaga pemerintahan yang menerapkan SPBE adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya pada UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tikomdik).

Penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan tentu dapat memicu munculnya risiko positif maupun risiko negatif terhadap organisasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Wantiknas pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan efek berantai seperti pemborosan anggaran belanja TIK, terjadinya disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah, risiko keamanan informasi, serta menurunnya validitas data pemerintah [1]. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global Risk Report, WEF pada tahun 2019 menunjukkan bahwa risiko terkait teknologi informasi seperti *data fraud* dan *cyber attacks* memasuki urutan 10 besar risiko global di dunia [2]. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu tata kelola manajemen risiko yang baik sehingga dapat memberikan pertimbangan secara terstruktur kepada organisasi dalam menghadapi risiko yang terjadi. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diharuskan memenuhi regulasi pemerintah, yang mana mewajibkannya untuk melaksanakan manajemen risiko sesuai pada Permen PANRB No.5 Tahun 2020 yaitu Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) [12].

Manajemen Risiko SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE bagi Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah [12]. Pedoman tata kelola ini akan dijadikan landasan dalam penyusunan manajemen risiko SPBE sedangkan untuk referensi tambahan menggunakan ISO 31000:2018 sebagai acuan proses manajemen risiko dan COBIT 5 *for Risk* sebagai acuan penilaian dan penanganan risiko.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, berikut adalah masalah yang akan diangkat pada tugas akhir ini:

1. Bagaimana hasil analisis risiko terhadap penerapan SPBE di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2020?
2. Bagaimana proses penilaian risiko SPBE di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana solusi dan rekomendasi penanganan risiko SPBE di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, berikut adalah tujuan dilakukannya tugas akhir ini:

1. Menghasilkan analisis risiko SPBE di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2020.
2. Menghasilkan rancangan penilaian risiko (*risk treatment plan*) SPBE di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menggunakan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.
3. Menghasilkan solusi dan rekomendasi penanganan risiko SPBE di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan diatas, berikut adalah manfaat dilakukannya tugas akhir ini:

1. Dapat membantu Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam memenuhi regulasi Pemerintah yang tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018.
2. Dapat membantu Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam mengelola risiko dengan memberikan rancangan penilaian risiko (*risk treatment plan*) terhadap risiko SPBE di Dinas Pendidikan Jawa Barat.
3. Dapat membantu Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam menangani risiko SPBE dengan memberikan solusi dan rekomendasi penanganan risiko.
4. Dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dalam bidang manajemen risiko SPBE di lembaga pemerintahan.

## **I.5 Ruang Lingkup**

Berikut adalah batasan masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini:

1. Lingkup penelitian dilakukan di UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Jawa Barat.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada kategori risiko proses bisnis, pengadaan barang dan jasa, proyek pembangunan/pengembangan sistem, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, layanan SPBE, SDM SPBE, dan bencana alam.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada area dampak reputasi, layanan, operasional, kinerja, dan SDM.
4. Hasil penelitian ini berupa solusi penanganan dan rekomendasi manajemen risiko.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

### **Bab I** Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika yang dipakai dalam penelitian.

### **Bab II** Kajian Pustaka

Bab ini berisi pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku atau jurnal yang relevan dengan penyusunan tugas akhir.

### **Bab III** Metodologi Penelitian

Bab ini berisi penjelasan tentang sistematika yang dilakukan selama penelitian, disertai pemaparan mengenai metode pemrosesan data.

### **Bab IV** Pengolahan Data

Bab ini berisi penjelasan mengenai proses pengumpulan, pengolahan serta analisis data, dan pemaparan proses perancangan solusi dan rekomendasi penanganan risiko yang digunakan dalam penelitian.

### **Bab V** Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan.